

PELATIHAN DAN BIMBINGAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASJID
DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI KOTA METRO

Yufi Maskuro

yufiwiymaskuro@gmail.com

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pengelola masjid dalam mengelola keuangan masjid untuk memberdayakan umat di Kota Metro. Obyek penelitian ini adalah masjid yang berada pada wilayah Kota Metro dan yang menjadi sumber pemberi data pada penelitian ini ada pengurus masjid yang mengurus masalah keuangan masjid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya pemahaman kepada pengelola masjid dalam mengelola keuangan masjid untuk memberdayakan umat di Kota Metro. Keterbatasan penelitian ini yaitu hanya membahas seberapa besar pemahaman kepada pengelola masjid dalam mengelola keuangan masjid untuk memberdayakan umat di Kota Metro, serta jumlah sampel dan populasi yang diteliti hanya masjid yang ada pada wilayah Kota Metro sehingga membuka peluang untuk peneliti-peneliti yang baru dengan mengangkat tema yang sama. Implikasi penelitian ini diharapkan agar bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan berkaitan dengan memberikan pemahaman kepada pengelola masjid dalam mengelola keuangan masjid untuk memberdayakan umat di Kota Metro.

Keyword: *Akuntansi, Masjid, Transparansi, Akuntabilitas*

1. PENDAHULUAN

Keberadaan masjid tidak dapat dilepaskan dari pengelolaan dana yang berasal dari sumbangan umat yang hanya mengharapkan balasan dari Allah, SWT. Akan tetapi, bukan berarti masyarakat tidak menginginkan pertanggungjawaban dari pengurus keagamaan, misalnya takmir masjid, terkait pengelolaan dana amal masjid. Dana dari masyarakat merupakan sumber keuangan masjid. Dana dari masyarakat dapat berbentuk sumbangan,

sedekah atau bentuk bantuan sosial lainnya yang berasal dari masyarakat (publik). Artinya, masjid menjadi bagian dari entitas publik yang semua aktivitasnya harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kata kunci yang penting bagi entitas publik untuk bertahan dan memaksimalkan perannya pada domain sosial budaya dimana entitas tersebut berada yang berbeda dengan entitas publik lainnya.

Meskipun tujuan utama masjid adalah memberikan pelayanan kepada umat, namun bukan berarti masjid sama sekali tidak memiliki tujuan keuangan. Keuangan dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi berkembangnya pelayanan. Sama halnya dengan organisasi atau lembaga publik lainnya, organisasi keagamaan seperti masjid juga dituntut untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif dari aktivitas yang dilakukannya. Dengan demikian, praktik akuntansi sebagai instrumen akuntabilitas dan transparansi keuangan masjid merupakan aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dalam rangkaian pengelolaan kegiatan, baik itu dalam bentuk lengkap maupun dalam lingkup yang sederhana sekalipun.

2. LANDASAN TEORI

Sistem pertanggungjawaban di organisasi keagamaan dapat bersifat vertikal maupun horizontal. Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti kepada Pembina. Dalam konteks yang lebih jauh lagi, pertanggungjawaban secara vertikal juga berarti pertanggungjawaban kepada Tuhan, meskipun tidak ada dalam bentuk materi maupun fisik. Sedangkan pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, khususnya pengguna atau penerima layanan organisasi keagamaan yang bersangkutan. Kedua pola pertanggungjawaban tersebut merupakan elemen penting dari proses akuntabilitas public.(Abdul Halim;2014)

Agar menciptakan akuntabilitas yang baik, dibutuhkan sarana untuk mewujudkannya, yaitu dengan mengimplemntasikan akuntansi pada organisasi keagamaan. Peran akuntansi dalam organisasi keagamaan diukur

dari seberapa besar manfaat akuntansi pada organisasi keagamaan tersebut.

Ada tiga manfaat akuntansi, yaitu:

1. Menyediakan akuntabilitas publik
2. Memberikan informasi yang akurat dan andal
3. Sebagai pengendalian manajemen

Informasi yang tepat dan akurat dapat berguna bagi pengurus organisasi keagamaan untuk pengambilan keputusan manajerial. Implementasi akuntansi biaya dan akuntansi manajemen dapat membantu pengurus untuk mengelola organisasi keagamaan dengan efektif dan efisien. Efektivitas pengelolaan dana terkait dengan kesesuaian alokasi dan penggunaan dana dengan tujuan organisasi, dan efisiensi terkait dengan kewajaran besaran dana yang digunakan untuk membiayai sebuah aktivitas atau kegiatan organisasi. Sedangkan untuk keperluan akuntabilitas publik, pengurus perlu menerapkan akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan yang sesuai dengan organisasi keagamaan adalah akuntansi untuk entitas nirlaba sebagaimana yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).(Indra Bastian:2007) Berdasarkan PSAK No. 45, laporan keuangan yang harus disajikan adalah Laporan Laba/Rugi, Laporan Arus Kas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Kegiatan akuntansi sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas di organisasi keagamaan khususnya Islam melalui masjid memang masih kurang menjadi perhatian khusus, baik dalam praktik maupun dalam kajian ilmiah. Hingga saat ini, masih saja ditemui informasi yang tidak menyenangkan terkait dengan tanggung jawab keuangan para pengurus masjid. Sebagai salah satu contoh, masih ada pengurus masjid di Kota Metro yang kurang amanah dalam mengelola dana masjid yang bersumber dari umat. Mereka tidak mempublikasikan penggunaan dana masjid kepada masyarakat dan menggunakan dana yang bernilai ratusan juta tersebut untuk kepentingan pribadi.(Suharto:2015)

Kegiatan akuntansi dalam organisasi keagamaan dipandang sesuatu yang kurang lazim, jarang dipraktikkan dan jarang sekali mendapat perhatian. Persepsi bahwa organisasi keagamaan tidak membutuhkan pengelolaan yang baik (*good governance*) menyebabkan praktik akuntabilitas dan transparansi dalam entitas ini tidak memiliki bentuknya. Semua praktik keuangan dan pengelolaan kelembagaan hanya didasari oleh kepercayaan (*trust agency*) tanpa memiliki sistem untuk mewujudkan kepercayaan tersebut kepada masyarakat.(Danhil Anzar:2011)

Sekarang ini akuntansi belum dijadikan kebutuhan bagi sebagian besar pengurus organisasi masjid. Tetapi, tidak menutup kemungkinan apabila meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat dan meningkatnya kesadaran umat muslim akan pentingnya akuntabilitas dan transparansi menjadikan penerapan sistem akuntansi yang baik menjadi kebutuhan mendasar bagi organisasi masjid. Oleh karena itu, bimbingan akuntansi dan pengelolaan keuangan masjid menjadi kegiatan yang unik dan sangat penting untuk mengenalkan praktik akuntansi dan pengelolaan keuangan di masjid serta sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan masjid. Berdasarkan uraian di atas, maka pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk“Pelatihan Dan Bimbingan Pengelolaan Keuangan Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat” ini bertujuan untuk: (1) Memberikan pengetahuan mengenai pentingnya akuntabilitas dan transparansi keuangan organisasi keagamaan, dalam hal ini adalah masjid. Untuk menciptakan akuntabilitas yang baik, salah satu sarana yang diperlukan untuk mewujudkannya adalah dengan menerapkan akuntansi; (2) Membuat sistem pencatatan, pembukuan, serta pelaporan yang tepat untuk aktivitas masjid sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Nirlaba (PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba); (3) Memacu perkembangan masjid menjadi organisasi modern yang dapat berperan dan berfungsi melebihi tujuan utamanya, terutama dalam hal pemberdayaan ekonomi umat.

3.METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif,. Pendekatan kualitatif digunakan apabila data yang hendak dikumpulkan adalah data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata atau kalimat. Penelitian kualitatif sangat mengutamakan kualitas data, sehingga dalam penelitian kualitatif tidak digunakan analisis statistika. (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ed.),1989) dan Jacob Vredendregt, 1981).

Dilihat dari cara pembahasannya, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif, bukan inferensial. Penelitian deskriptif hanya melukiskan, memaparkan, menuliskan, dan melaporkan suatu keadaan, suatu objek atau suatu peristiwa fakta apa adanya, dan berupa penyingkapan fakta. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. (Moh. Nazir, 1988).

Sedangkan dilihat dari tempat pelaksanaan penelitian, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan (*case study*), bukan penelitian laboratorium maupun penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam materi yang terdapat di ruang lapangan. Berdasarkan jenis investigasinya, penelitian ini termasuk dalam penelitian kausal karena penelitian ini ingin menemukan jawaban atas persoalan yang dihadapi (Sekaran, 2015:164).

4. PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian masyarakat tentang Bimbingan Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Organisasi Keagamaan (Masjid) ini dilaksanakan dari tanggal 3 Oktober sampai 31 Oktober 2019. Subjek dari bimbingan ini yaitu pengurus masjid di Kota Metro, terutama pengelola keuangan masjid. Peserta bimbingan diberikan materi berupa urgensi akuntabilitas dan transparansi dalam perspektif Islam, fungsi dan peran masjid dalam

pengembangan ekonomi, pemberdayaan ekonomi masjid, penyusunan anggaran berbasis aktivitas masjid, penyusunan laporan anggaran dan realisasi anggaran berbasis aktivitas masjid dan penyusunan laporan keuangan masjid berdasarkan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Narasumber dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah dosen dari Fakultas Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung

Kegiatan bimbingan akuntansi dan pengelolaan keuangan organisasi keagamaan (masjid) dilakukan dengan berbagai metode, di antaranya metode ceramah, diskusi, tanya jawab, serta metode simulasi. Metode ceramah, narasumber menyampaikan materi terkait, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab dari peserta. Dalam sesi tanya jawab, peserta diberikan kesempatan untuk menanyakan seputar materi maupun mengenai kendala-kendala yang mereka hadapi dalam mengelola keuangan masjid serta menyusun laporan keuangan masjid. Pada sesi akhir bimbingan, digunakan metode simulasi dimana peserta mempraktikkan sendiri penyusunan laporan anggaran dan realisasi anggaran berdasarkan aktivitas masjid serta penyusunan laporan keuangan masjid berdasarkan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Di dalam metode simulasi ini, sebelum dilakukan penyusunan laporan realisasi anggaran masjid dan penyusunan laporan keuangan masjid, peserta diminta untuk mengidentifikasi apa saja aktivitas-aktivitas rutin maupun yang tidak rutin yang ada di masjidnya, apa saja komponen-komponen asset masjid, komponen sumber keuangan masjid (asset neto dan kewajiban masjid), serta komponen penerimaan dan pengeluaran masjidnya.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 hari di Masjid al- Mauna. Hari kesatu, narasumber menyampaikan materi tentang urgensi akuntabilitas dan transparansi keuangan masjid ditinjau dari perspektif agama Islam. Narasumber memaparkan tentang apa itu akuntabilitas, transparansi, prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam perspektif Agama Islam yang dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang relevan. Pada pemaparan materi di hari pertama, digunakan metode ceramah, diskusi/tanya

jawab seputar tema yang disampaikan.

Hari ke dua, narasumber menyampaikan materi tentang fungsi dan peran masjid dalam pemberdayaan ekonomi umat. Dalam materinya, narasumber memaparkan bentuk pemberdayaan ekonomi yang dapat dilakukan oleh para pengurus masjid, diantaranya melalui pemberdayaan zakat produktif dan pembentukan koperasi syariah (BMT). Narasumber juga memaparkan apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh masjid dalam melakukan pemberdayaan ekonomi serta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Pada pemaparan materi di hari ke dua, digunakan metode ceramah, diskusi/tanya jawab seputar tema yang disampaikan.

Hari ke tiga, narasumber menyampaikan materi tentang penyusunan dan penyajian laporan anggaran serta laporan realisasi anggaran berbasis aktivitas masjid. Pada kesempatan ini, narasumber memaparkan pentingnya masjid untuk menyusun anggaran kegiatan, baik kegiatan rutin maupun insidental karena meskipun tujuan utama masjid adalah memberikan pelayanan kepada umat, namun bukan berarti masjid sama sekali tidak memiliki tujuan keuangan. Masjid juga dituntut untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif dari aktivitas yang dilakukannya. Hal ini dapat diwujudkan dengan menerapkan praktik akuntansi manajemen dan biaya meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana. Pada pemaparan materi di hari ke tiga, digunakan metode ceramah, diskusi/tanya jawab seputar tema yang disampaikan.

Hari ke empat, narasumber menyampaikan materi tentang penyusunan laporan keuangan masjid berdasarkan PSAK No. 45 (Revisi 2011) tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Dalam penyampaian materinya, narasumber memaparkan pedoman penyusunan laporan keuangan masjid untuk pihak eksternal/masyarakat umum, yaitu PSAK No. 45 Tahun 2011. Selain itu, narasumber juga memaparkan apa saja laporan yang harus disajikan oleh entitas nirlaba, bagaimana teknis penyusunannya, bagaimana format pelaporannya, serta tantangan yang dihadapi dalam menerapkan

PSAK No. 45 ini. Pada pemaparan materi di hari ke empat, digunakan metode ceramah, diskusi/tanya jawab seputar tema yang disampaikan.

Hari ke lima atau hari terakhir, tim pelaksana kegiatan melakukan simulasi penyusunan laporan anggaran dan realisasi anggaran berbasis aktivitas masjid serta penyusunan laporan keuangan masjid berdasarkan PSAK No. 45 Tahun 2011 bagi peserta kegiatan. Dalam simulasi ini, peserta mempraktikkan sendiri penyusunan laporan anggaran dan realisasi anggaran berdasarkan aktivitas masjid serta penyusunan laporan keuangan masjid berdasarkan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Sebelum dilakukan penyusunan laporan realisasi anggaran masjid dan penyusunan laporan keuangan masjid, peserta diminta untuk mengidentifikasi apa saja aktivitas-aktivitas rutin maupun yang tidak rutin yang ada di masjidnya, apa saja komponen-komponen asset masjid, komponen sumber keuangan masjid (asset neto dan kewajiban masjid), serta komponen penerimaan dan pengeluaran masjidnya.

Hasil pengamatan tim pelaksana selama 5 hari kegiatan, kegiatan ini telah membuka wawasan para pengurus masjid akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas, terutama transparansi dan akuntabilitas keuangan dalam perspektif Islam. Para pengurus masjid juga diberikan pemahaman tentang fungsi dan peran masjid dalam pemberdayaan ekonomi. Selain itu, para pengurus masjid juga diberikan pengetahuan tentang bagaimana cara menyusun anggaran berbasis aktivitas masjid, bagaimana cara menyusun laporan anggaran dan realisasi anggaran berbasis aktivitas masjid, dan bagaimana cara menyusun laporan keuangan masjid berdasarkan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.

Para peserta bimbingan sangat antusias dengan terlaksananya kegiatan ini. Hal ini dilihat dari adanya para pengurus masjid, terutama para bendahara yang meminta bimbingan langsung ke masjid-masjid untuk memberikan pendampingan dalam hal penyusunan laporan keuangan masjid berdasarkan PSAK 45(Revisi 2011).

Berdasarkan hasil analisis antara narasumber, tim pelaksana kegiatan, dan

peserta selama kegiatan berlangsung, diperoleh beberapa informasi berikut:

1. Seluruh masjid pada umumnya memiliki aktivitas/program rutin, baik bulanan maupun tahunan, namun penyusunan anggaran dan penyajian laporan realisasi anggaran masih dilakukan seadanya. Proses penyusunan anggaran dan pelaporan anggaran dan realisasi anggaran pada umumnya belum diadministrasi dengan baik. Hal ini dikarenakan proses akuntansi untuk pencatatan kegiatan dilakukan oleh masing-masing panitia pelaksana dimana kepanitiaan tersebut bersifat temporer sehingga pencatatan dan pelaporan bersifat parsial dan temporer oleh panitia pelaksana yang bersangkutan. Aktivitas pencatatan dan administrasi tidak digabung pada laporan aktivitas masjid secara keseluruhan selama satu periode. Akibatnya, laporan anggaran dan realisasi anggaran masjid bersifat parsial dan temporer, tidak mencerminkan laporan masjid dalam satu periode, misal 1 tahun.
2. Dalam kaitannya dengan kegiatan pemberdayaan ekonomi masjid, diperoleh beberapa informasi bahwa hanya sebagian kecil masjid yang telah melakukan pemberdayaan ekonomi, terutama masjid-masjid besar yang memiliki sumber dana/sumber keuangan yang relatif besar. Pemberdayaan ekonomi dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran zakat produktif dan memberikan jasa pembiayaan melalui koperasi kepada para pengurus dan warga sekitar masjid. Belum berjalannya kegiatan pemberdayaan ekonomi oleh masjid dikarenakan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah keterbatasan SDM yang mengelola keuangan masjid, keterbatasan sumber dana masjid, serta faktor kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar masjid.
3. Sebagian besar para pengurus masjid telah melaksanakan praktik akuntansi sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas keuangan meskipun dalam format yang sangat sederhana dan belum memenuhi ketentuan dalam PSAK No. 45 tentang Pelaporan keuangan Entitas Nirlaba. Pada umumnya, para pengurus masjid, terutama bendahara masjid tidak mengetahui keberadaan PSAK No. 45 tentang Pelaporan keuangan

Entitas Nirlaba sebagai acuan penyusunan laporan keuangan untuk dipublikasikan terutama kepada publik. Laporan keuangan yang disusun dan disajikan hanya sebatas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Masjid. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa para pengurus masjid sudah melaksanakan tanggungjawabnya untuk menyampaikan informasi keuangan masjid kepada masyarakat.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut Pengurus masjid telah melaksanakan praktik akuntansi sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas keuangan meskipun dalam format yang sangat sederhana dan belum memenuhi ketentuan dalam PSAK No. 45 tentang Pelaporan keuangan Entitas Nirlaba.

Pengurus masjid Sebagian besar, bendahara masjid tidak mengetahui keberadaan PSAK No. 45 tentang Pelaporan keuangan Entitas Nirlaba sebagai acuan penyusunan laporan keuangan untuk dipublikasikan terutama kepada publik. Laporan keuangan yang disusun dan disajikan hanya sebatas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Masjid.

Hanya sebagian kecil masjid yang telah melakukan pemberdayaan ekonomi, terutama masjid-masjid besar yang memiliki sumber dana besar. Pemberdayaan ekonomi dilakukan dengan mengoptimalkan peran zakat produktif dan memberikan jasa pembiayaan melalui koperasi kepada para pengurus dan warga sekitar masjid. Hal ini dikarenakan keterbatasan SDM yang mengelola keuangan masjid, keterbatasan sumber dana masjid, serta faktor kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar masjid.

Kegiatan ini membuka wawasan para pengurus masjid akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas, terutama transparansi dan akuntabilitas keuangan dalam perspektif Islam. Para pengurus masjid juga diberikan pemahaman tentang fungsi dan peran masjid dalam pemberdayaan ekonomi. Selain itu, para pengurus masjid juga diberikan pengetahuan tentang bagaimana cara menyusun anggaran berbasis aktivitas masjid, bagaimana cara menyusun laporan anggaran dan realisi

anggaran berbasis aktivitas masjid, dan bagaimana cara menyusun laporan keuangan masjid berdasarkan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.

Bagi para pengurus masjid, khususnya bendahara masjid dapat menerapkan PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Masjid sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan masjid untuk tujuan publikasi meskipun hal tersebut sifatnya masih sukarela. Hal ini penting mengingat laporan keuangan publikasi merupakan instrumen transparansi dan akuntabilitas masjid kepada masyarakat umum. Laporan keuangan yang kredibel juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pengurus masjid sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan sumber pemasukan masjid.

6. REFERENSI

- Abdul Halim, 2014, *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- Dahnil Anzar Simanjuntak dan Yeni Januarsari, 2011, *Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid*, makalah disampaikan dalam *call for paper* Simposium Nasional Akuntansi 2011, Aceh.
- Hariyanti Sadaly, 2002, *Akuntabilitas Publik Ornop*, Laporan Lokakary: Lembaga Penelitian SMERU.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2012, *Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juni 2012 (SAK revisi)*, Salemba Empat, Jakarta.
- Indra Bastian, 2007, *Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik*, Erlangga, Jakarta
- Iwan Triyuwono, 2000, *Organisasi dan Akuntansi Syariah*, LKiS, Yogyakarta
- Kama, A.Z., 2001, *Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Jurnal Ilmiah Ishlah, ISSN. 1410 – 9328, Vol.13 No. 03.
- Mardiasmo, 2006, *Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*, Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol.2, No.1, Mei 2006

- Mardiasmo, 2005, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta.
- Moh. Nazir. 1988. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sutedjo, 2009, *Persepsi Stakeholders Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas*
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survey*. LP3ES. Jakarta.
- Uma Sekaran. 2015. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis (Research Methods for Business)*. Jakarta: Salemba Empat
- Pengelolaan Keuangan Sekolah*. Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. <http://eprints.undip.ac.id/24292/1/Sutedjo.pdf>.
- Vredenburg, J. 1981. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Akuntansi untuk Entitas Tempat Ibadah: Akuntansi Masjid*, tersedia di <http://accounting-media.blogspot.com/2014/07/akuntansi-untuk-entitas-tempat-ibadah.html>,
- Fungsi dan Peran Masjid*, tersedia di [http:// www.masjidrayavip.org /index.php?view= article&catid=45%3Aartikel-islam&id=125%3Afungsi-dan-peran masjid&format=pdf&option=com_content&Itemid=67](http://www.masjidrayavip.org/index.php?view=article&catid=45%3Aartikel-islam&id=125%3Afungsi-dan-peran-masjid&format=pdf&option=com_content&Itemid=67)